

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Pratama Raharja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi), Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.156.
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta, 2008.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhi, Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2011.
- Ruth Borchard. John Stuart Mill : The Man, Was. London. 1957.
- Philipus M. Hadjon, Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

- Jhon M. E dan Hasan Sadli, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 378.
- Munir Fuady, Hukum Tentang PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2.
- Agus Daryanto, Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya), Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 87.
- Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2000, hlm. 113.
- Abdul Moin, Akuisisi dan Divertasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 6.
- Munir Fuady, Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 80.
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 117.
- Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 50.
- Arie Susanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.3.
- Hermansyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008,hlm.2.
- Gunawan Widjaja, Merger Perspektif Monopoli, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Cetakan.1, hlm. 9.
- Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62.
- Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, PT Gramedia, Jakarta, 2010), hlm. 1.
- Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2009), hlm., 130.
- Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 634.
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 582.

B. Jurnal Hukum

Anggita Darmayoni, “Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016)

Rilda Murniati, Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19), JURNAL PERSAINGAN USAHA Vol. 02 Tahun 2021, hlm. 44.

Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwanasyah, Pupung Faisal, Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.